

tl. 19.03

SALINAN

numb a/f
82/83.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahnya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surainya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
- c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasonto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Instektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPK - RI,
26. Komisi IX DPR ? RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan

Mengetahui

Kepala Bidang Dik Menum
Kanwil Depdikbud Prop. Jatim

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

ARIEF SOEDJONO
NIP. 130432545.

	1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR Pembukaan						
	(1) SMP Negeri 24 Surabaya	Karangpilang	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110			
	2. SMP Negeri 25 Surabaya.	Sawahan	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.120			
	3. SMP Negeri 26 Surabaya	Tandes	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.140			
	4. SMP Negeri 13 Malang	Klojen	Kotamadya Malang	09.1.2.1038.23.01.05.210			
	5. SMP Negeri 7 Madiun	Madiun Kota	Kotamadya Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.220			
	6. SMP Negeri 8 Blitar	Blitar	Kotamadya Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.230			
	7. SMP Negeri 6 Kediri	Majoroto	Kotamadya Kediri	09.1.2.1038.23.01.05.231			
	8. SMP Negeri Ujung Pangkah.	Ujung Pangkah	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.232			
	9. SMP Negeri Benjeng	Benjeng	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.233			
	10. SMP Negeri Kedameyan	Kedameyan	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.234			
	(11) SMP Negeri Wringinanom	Wringinanom	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.235			
	12. SMP Negeri Duduk Sampeyan	Duduk Sampeyan	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.236			
	13. SMP Negeri Menganti	Menganti	Kabupaten Gresik				
	14. SMP Negeri Panceng	Panceng	Kabupaten Gresik				
	15. SMP Negeri Manyar	Manyar	Kabupaten Gresik				
	16. SMP Negeri Tambak	Tambak	Kabupaten Gresik				
	17. SMP Negeri Kebomas	Kebomas	Kabupaten Gresik				
	18. SMP Negeri Buduran	Buduran	Kabupaten Sidoarjo				
	19. SMP Negeri Tanggulangan	Tanggulangan	Kabupaten Sidoarjo				
	20. SMP Negeri Balungbendo	Balungbendo	Kabupaten Sidoarjo				